

Nama : Nina Oktaviana

NPM : 2413031057

Kelas : B

CASE STUDY Teori Akuntansi

Pertanyaan:

- 1. Analisis Perilaku Manajemen PT Lestari Mineral dalam Memilih Kebijakan Akuntansi Konservatif**
- 2. Jika Anda adalah akuntan perusahaan bagaimana menyikapi tekanan investor luar negeri yang mendorong perubahan kebijakan akuntansi?**
- 3. Bagaimana proses penetapan standar akuntansi dipengaruhi oleh ekonomi politik nasional & global? (dengan contoh)**
- 4. Bandingkan standard-setting berbasis prinsip (IFRS) vs berbasis aturan (GAAP). Mana lebih relevan untuk Indonesia dan kenapa?**

Jawaban:

Motivasi perilaku:

1. Kehati-hatian / pengelolaan risiko reklamasi pertambangan merupakan kewajiban yang berlangsung lama dengan banyak ketidakpastian (biaya, teknologi, peraturan). Strategi yang hati-hati akan menunda pengakuan atau mengakui estimasi biaya yang lebih tinggi sehingga mengurangi kemungkinan kekurangan penyisihan.
2. Melindungi likuiditas dan kemampuan bayar menyisihkan biaya lingkungan mungkin mengurangi laba saat ini, tetapi memperkuat posisi kewajiban dalam neraca; ini memberikan manfaat bagi kreditor dan akses pembiayaan jangka panjang.
3. Menghindari masalah hukum/regulator pengakuan yang ketat dapat menurunkan risiko tuntutan dari publik atau pihak regulator jika reklamasi tidak berhasil.

4. Mengelola ekspektasi pemangku kepentingan lokal mengubah laporan untuk sesuai dengan nilai yang berlaku di daerah (keberlanjutan/transparansi sosial), terutama ketika pemerintah/komunitas menuntut akuntabilitas terhadap lingkungan.

5. Insentif internal remunerasi bagi manajemen, sasaran kinerja berbasis jangka panjang, atau budaya perusahaan yang konservatif mendorong kebijakan semacam ini.

Potensi dampak terhadap pemangku kepentingan:

Pemegang saham/investor asing: laba yang lebih rendah dalam jangka pendek → kemungkinan ketidakpuasan, tekanan untuk mengubah kebijakan yang dapat menyebabkan volatilitas harga saham atau pergeseran modal.

Kreditor/pemberi pinjaman: mengamati proyeksi kewajiban yang lebih realistis → menilai risiko kredit dengan lebih baik; aman untuk pemberi pinjaman.

Komunitas dan lingkungan: mendapatkan keuntungan karena ada cadangan untuk reklamasi → meningkatkan kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan operasional.

Regulator dan pemerintah: kebijakan yang hati-hati biasanya sejalan dengan kepentingan publik; membuat kepatuhan lebih mudah.

Manajemen dan karyawan: pendekatan konservatif → ada kemungkinan stabilitas jangka panjang, tetapi mungkin juga ada tekanan dari investor untuk "meningkatkan laba."

Reputasi: pendekatan yang hati-hati dapat memperbaiki reputasi terkait tanggung jawab lingkungan, tetapi mungkin dianggap oleh beberapa investor sebagai "inefisiensi."

2. Langkah praktis yang etis dan profesional:

1. Pastikan adanya kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku (baik nasional maupun IFRS jika diterapkan) serta prinsip profesional seperti integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional. Hindari mengubah kebijakan hanya untuk meningkatkan keuntungan tanpa dukungan dari standar dan bukti yang kuat.

2. Tinjau kembali estimasi dan asumsi secara mandiri buat dokumentasi, analisis sensitivitas, dan model skenario biaya reklamasi (kasus terbaik / yang diharapkan / terburuk). Perhatikan dampak perubahan asumsi terhadap laporan.

3. Berkomunikasilah dengan investor, dewan, dan komite audit sampaikan alasan konservatif, ketidakpastian estimasi, serta perbandingan efek jangka pendek dengan jangka panjang; tawarkan kejelasan melalui pengungkapan informasi yang transparan.
4. Perkuat informasi yang diungkapkan sediakan rincian tentang metode estimasi, asumsi yang utama, rentang estimasi, dan batasan yang ada. Investor yang cerdas lebih menghargai transparansi ketimbang manipulasi laba.
5. Diskusikan dengan auditor eksternal dan penasihat hukum/akuntansi — untuk memastikan setiap perubahan kebijakan didasari oleh bukti yang kuat dan mematuhi standar yang ada.
6. Pertimbangkan opsi kompromi misalnya, menyajikan ukuran kinerja alternatif (non-GAAP) dengan penjelasan yang jelas; atau menyajikan angka pro forma yang menunjukkan dampak dari pengakuan yang berbeda, disertai penjelasan.
7. Pertahankan independensi profesional dan tata kelola — jika tekanan dari investor berpotensi melanggar standar atau mendorong manipulasi, laporkan kepada komite audit atau dewan komisaris.

Apakah mengikuti keinginan investor bertentangan dengan kode etik akuntan?

Hal ini bisa dianggap melanggar jika perubahan dilakukan semata-mata untuk meningkatkan laba tanpa dasar akuntansi yang sah atau dengan memanipulasi asumsi yang ada.

Prinsip etika (misalnya IESBA / kode etik lokal) mengharuskan: integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Mengubah kebijakan hanya demi kepentingan investor, terutama jika melanggar standar atau menyembunyikan informasi penting, akan menciderai integritas, objektivitas, serta kehati-hatian. Namun, diskusi yang sehat dengan investor dan penyesuaian kebijakan yang sah (misalnya jika ada interpretasi baru dari standar yang valid dan didukung oleh bukti) tidak serta-merta dapat dianggap tidak etis selama dilakukan secara transparan, terdokumentasi, serta sesuai dengan standar dan mendapat persetujuan dewan/auditor.

3. Mekanisme dampak ekonomi-politik:

1. Pengaruh dan tekanan industri asosiasi-asosiasi industri berupaya memengaruhi pembuat aturan agar kebijakan yang dihasilkan menguntungkan sektor mereka (misalnya, dengan menekan biaya dan mengurangi beban pelaporan).
2. Kepentingan ekonomi dan politik pemerintah berusaha untuk menetapkan standar yang sejalan dengan sasaran ekonomi nasional (seperti investasi dan penciptaan lapangan kerja), atau untuk menghindari konsekuensi fiskal (seperti dampak perpajakan).
3. Penangkapan regulasi pihak yang mengatur atau pembuat standar dapat terpengaruh oleh kepentingan tertentu jika pengawasan tidak disiplin.
4. Pengaruh ekonomi global dan keselarasan internasional badan yang menetapkan standar internasional (misalnya IASB) dipengaruhi oleh negara-negara kuat, konsultan besar, dan investor internasional. Negara-negara berkembang mungkin menyesuaikan standar agar sesuai dengan praktik internasional sambil tetap melindungi industri lokal.
5. Pandangan publik dan LSM dorongan dari masyarakat, organisasi non-pemerintah lingkungan, atau investor bertanggung jawab (ESG) mendorong penerapan standar yang lebih ketat terkait isu keberlanjutan.

Contoh dari situasi ini:

Pada kasus PT Lestari Mineral, asosiasi industri pertambangan dan tekanan politik di tingkat nasional mendorong pembuat standar lokal untuk “melonggarkan” pengakuan biaya reklamasi agar tidak membebani pelaku industri — ini adalah contoh dari lobbying. Sebaliknya, para investor asing mendorong penafsiran IFRS yang dapat meningkatkan laba (dengan cara yang lebih agresif) menunjukkan bentrokan antara kepentingan global dan lokal.

Contoh lain dari kenyataan (tanpa penelitian eksternal saat ini):

Perdebatan tentang pengakuan pendapatan dan akuntansi sewa: Perubahan yang signifikan seperti pengembangan standar baru sering kali menghadapi tekanan dari perusahaan-perusahaan besar yang khawatir tentang dampak pengakuan pendapatan atau sewa terhadap laporan keuangan. (Ilustrasi umum: pembuat standar mendapatkan banyak masukan dari industri.)

Standar nilai wajar versus biaya historis: Selama krisis keuangan, perdebatan mengenai penilaian nilai wajar berlawanan dengan biaya historis menunjukkan bagaimana krisis ekonomi memengaruhi preferensi standarpemerintah dan regulator cenderung meminta fleksibilitas untuk mencegah "terlalu banyak volatilitas. "

4. Perbedaan dasar:

Berbasis prinsip (contoh: IFRS):

Mengatur prinsip umum dan tujuan pelaporan; memerlukan penilaian profesional serta penggunaan judgement.

Memberikan fleksibilitas, dapat disesuaikan untuk berbagai sektor industri dan transaksi baru.

Risiko: interpretasi yang bervariasi menciptakan ketidakpastian, inkonsistensi, dan potensi "penyalahgunaan judgement".

Berbasis aturan (contoh: US GAAP tradisional):

Menyusun aturan yang rinci, garis batas yang jelas, serta banyak pengecualian.

Lebih bersifat preskriptif, mengurangi ruang untuk judgement sehingga menciptakan kepastian bagi operator.

Risiko: “pencarian celah” (perusahaan merancang transaksi agar sesuai dengan aturan), tingkat kompleksitas yang tinggi.

Mana yang lebih cocok untuk Indonesia?

Saran: Pendekatan berbasis prinsip (mirip IFRS) dengan elemen praktik yang kuat dalam pelaksanaan (hibrid).

Alasan:

1. Keterhubungan internasional: Indonesia terlibat dalam modal global; prinsip IFRS mempermudah perbandingan dan menarik minat investor luar negeri.
2. Variasi transaksi dan perkembangan ekonomi: prinsip memberikan kebebasan untuk transaksi baru (misalnya, instrumen yang berkelanjutan, kontrak yang kompleks).
3. Pentingnya judgement profesional: isu seperti estimasi reklamasi lingkungan memerlukan pertimbangan prinsip mendorong perhatian pada substansi ekonomi, bukan hanya formalitas.
4. Peningkatan kualitas pelaporan dan fokus pada substansi: prinsip mendukung pelaporan yang mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya.

Namun: Mengingat tantangan praktis di negara berkembang (kapasitas auditor, kesiapan penyusun laporan, risiko tata kelola), Indonesia sebaiknya menerapkan prinsip dengan:

Pedoman yang jelas untuk pelaksanaan, contoh penerapan dalam industri (panduan implementasi), ilustrasi, serta safe-harbors untuk isu teknis.

Pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk akuntan, auditor, dan regulator.

Sistem penegakan hukum dan pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan judgement.

Untuk sektor tertentu (pajak, regulasi prudensial), aturan yang rinci dapat dipertahankan hingga kapasitas pasar menjadi lebih kuat.

Ringkasan rekomendasi praktis untuk PT Lestari Mineral (singkat)

1. Pertahankan kebijakan konservatif jika didukung oleh standar dan bukti estimasi; berikan perhatian pada transparansi.
2. Sajikan pengungkapan terperinci mengenai asumsi biaya reklamasi dan sensitivitasnya.
3. Tawarkan pro-forma/pengungkapan alternatif untuk menunjukkan dampak jika asumsi berbeda (memuaskan investor tanpa melanggar standar).

4. Libatkan auditor dan dewan sebelum melakukan perubahan pada kebijakan.

5. Berikan advokasi konstruktif kepada regulator: perusahaan dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan standar agar suara industri terdengar secara terbuka, bukan melalui tekanan politik yang tertutup.